



UPHOLDING THE ERGA OMNES PRINCIPLE: THE ROLE OF CONSTITUTIONAL COURT DECISIONS IN THE FORMATION OF INDONESIA'S NEW PENAL CODE

MENEGUHKAN PRINSIP ERGA OMNES: PERAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PEMBENTUKAN KUHP BARU INDONESIA

Chaidir Ali^{1*}, Refi Meidiantama²

***Faculty of Law, Universitas Lampung**

***chaidir.ali@fh.unila.ac.id**

Volume 3, Number 1, March 2025

Received: February 11, 2025 Accepted: February 11, 2025 Online Published: March 27, 2025.

ABSTRACT

The erga omnes principle, denoting obligations owed universally rather than to specific parties, plays a crucial role in constitutional law and judicial review. In Indonesia, the Constitutional Court upholds this principle by ensuring its rulings have a binding effect on all legal actors and institutions. This paper examines how the Court's jurisprudence has shaped the new Indonesian Penal Code through landmark constitutional decisions. By analyzing key rulings that annulled provisions from the colonial-era Penal Code, this study explores the Court's influence on legislative reform and human rights protections. Utilizing normative legal research methods, including statute, case, and conceptual approaches, this study assesses how the Constitutional Court enforces the erga omnes principle through judicial review. The findings reveal that while several unconstitutional provisions from the old Penal Code were removed, some were reintroduced in the new code with modifications, often as complaint-based offenses to balance legal certainty with free expression. Despite these revisions, concerns persist regarding the potential misuse of reintroduced provisions to suppress dissent. This study underscores the Constitutional Court's role in safeguarding democracy by ensuring its decisions are universally applicable. However, challenges remain in enforcing compliance with its rulings. As Indonesia continues its legal evolution, ongoing judicial oversight will be essential to uphold constitutional supremacy, human rights, and the rule of law.

Keywords : Erga Omnes; Constitutional Court; Penal Code; Legal Reform; Judicial

ABSTRAK

Prinsip erga omnes, yang menunjukkan kewajiban hukum yang berlaku secara universal dan tidak terbatas pada pihak tertentu, memainkan peran krusial dalam hukum konstitusi dan mekanisme pengujian yudisial. Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi menegakkan prinsip ini dengan memastikan bahwa putusannya memiliki daya ikat terhadap seluruh aktor hukum dan institusi negara. Artikel ini mengkaji bagaimana yurisprudensi Mahkamah Konstitusi telah membentuk Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 melalui putusan-putusan penting dalam pengujian konstitusional. Dengan menganalisis putusan yang membatalkan sejumlah ketentuan dalam KUHP warisan kolonial, penelitian ini menyoroti peran Mahkamah Konstitusi dalam reformasi legislasi dan perlindungan hak asasi manusia. Melalui metode penelitian hukum normatif, yang meliputi pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, penelitian ini mengevaluasi bagaimana Mahkamah Konstitusi menerapkan prinsip erga omnes dalam putusan pengujian undang-undang. Temuan penelitian menunjukkan bahwa meskipun beberapa ketentuan yang dianggap inkonstitusional telah dihapus, beberapa di antaranya diadopsi kembali dalam KUHP baru dengan modifikasi, terutama dalam bentuk delik aduan guna menyeimbangkan kepastian hukum dan kebebasan berekspresi. Namun, masih terdapat kekhawatiran terhadap potensi penyalahgunaan pasal-pasal yang diadopsi kembali untuk membatasi kritik. Penelitian ini menegaskan bahwa Mahkamah Konstitusi berperan penting dalam menjaga demokrasi dengan memastikan bahwa putusannya berlaku secara luas dan mengikat. Namun, tantangan tetap ada dalam penegakan kepatuhan terhadap putusan tersebut. Seiring dengan perkembangan hukum di Indonesia, pengawasan yudisial yang berkelanjutan akan menjadi kunci dalam menegakkan supremasi konstitusi, hak asasi manusia, dan negara hukum.

Kata Kunci : Erga Omnes; Mahkamah Konstitusi; KUHP Indonesia; Reformasi Hukum; Pengujian Undang-Undang.